



RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA KECAMATAN PAGERUYUNG KABUPATEN KENDAL

TAHUN 2026



Kendal Handal
Beautiful Land, Good Business

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas Rahmat dan Hidayah-Nya dokumen Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pageruyung Tahun 2026 dapat diselesaikan dengan baik. Kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan ini.

Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Pageruyung Kabupaten Kendal berdasarkan pada Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Kendal Tahun 2026 yaitu Menuju Kendal Inclusive 2026 melalui Pemerataan Pembangunan dan Perekonomian.

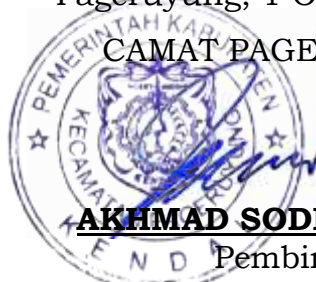
Penetapan Kinerja Tahun 2026 ini mendeskripsikan bagaimana capaian kinerja yang hendak diwujudkan oleh Kecamatan Pageruyung pada tahun 2026 sesuai dengan Rencana Strategik yang telah ditetapkan. Melalui instrumen ini diharapkan dapat mendorong terciptanya transparansi dan akuntabilitas dalam membangun pemerintahan yang baik dan terpercaya berdasarkan prinsip-prinsip good governance.

Kami menyadari bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Kecamatan Pageruyung Tahun 2026 ini masih banyak kelemahan dan kekurangan namun setidaknya dapat menjadi bahan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan sebagai tugas pokok dan fungsi Camat serta dapat menjadi bahan kajian yang bermanfaat bagi upaya peningkatan penyelenggaraan kegiatan yang akan datang.

Demikian dan semoga dokumen ini dapat menjadi bahan masukan serta informasi yang berguna bagi pengambil keputusan (decision maker) dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan.

Pageruyung, 1 Oktober 2026

CAMAT PAGERUYUNG



AKHMAD SODIKIN,S.Sos

Pembina

NIP. 19730822 199803 1 003

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	4
1.3 Maksud dan Tujuan	7
1.4 Sistematika Penulisan	8
BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	10
2.2 Kajian capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator yang ditentukan dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) maupun indikator kinerja kunci.....	23
2.3 Prestasi yang di capai di Tahun 2025	30
2.4 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	33
2.5 Review Terhadap Rancangan RKPD	40
2.6 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	50
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	
3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional	51
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	59
3.3 Program Kegiatan.....	59
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	76
BAB V PENUTUP	109
Lampiran - lampiran	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 Kec. Pageruyung	16
Tabel 2.2 Capaian Tambahan Kinerja Tahun 2025	19
Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kec. Pageruyung Kabupaten Kendal	28
Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Pegeruyung Kabupaten Kendal	47
Tabel 2.5 Review Terhadap RKPD Tahun 2026 Kecamatan Pageruyung	48
Tabel 2.6 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026	50
Tabel 3.1 Persandingan Antara Prioritas Nasional, Provinsi, Kabupaten Dengan Usulan Rencana Kerja Tahun 2025	58
Tabel 3.2 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Provinsi Jawa Tengah Kabupaten Kendal	63
Tabel 4.1 Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kab.Kendal	79

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1 Penghargaan Capaian Juara II Pelaksana Posyandu Terbaik Tk.Kabupaten	30
Gambar 2 Juara III Penyuluhan P4GN dan Tamu Kader PKK Tingkat Kab.Kendal tanggal 10 Desember 2023	31
Gambar 3 Penghargaan Kecamatan dengan Predikat Sangat Baik atas Laporan Pengawasan Kearsipan Internal Kab. Kendal 19 Oktober 2023	31
Gambar 4 Juara III Pekan Raya Kendal Tingkat Kabupaten Kendal 2024	32

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 86 Tahun 2017, setiap Perangkat Daerah diharuskan untuk menyusun Rencana Kerja (Renja). Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD. Penyusunan Renja Perangkat Daerah juga memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya guna perumusan kegiatan alternatif dan/atau baru untuk tercapainya sasaran Renstra Perangkat Daerah berdasarkan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal sebagai pelaksanaan dari amanat Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah telah terjadi perubahan nomenklatur Perangkat Daerah Kabupaten Kendal. Berdasarkan diktum kedua Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/SJ Tahun 2016 tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, mengamanatkan kepada daerah yang telah menetapkan Perda tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah untuk segera melakukan penyesuaian dokumen rencana pembangunan daerah sesuai kelembagaan perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016. Perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026, diperlukan dalam rangka penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2021 - 2026, sehingga terdapat konsistensi antara dokumen perencanaan dan dokumen

penganggaran sebagai bagian dari evaluasi audit kinerja yang mulai dilaksanakan tahun 2026. Dokumen perencanaan dan penganggaran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam perjalanan roda Pemerintahan Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut diperlukan penyelarasan dan penyempurnaan sejak tahap penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah mengacu pada arah kebijakan pembangunan tahun 2026, arah kebijakan pembangunan Kabupaten Kendal pada tahun 2026 adalah **“Sustainable Kendal”** dengan prioritas pada **“Peningkatan Ketahanan Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan”**. Pada tahun ini. Prioritas tahun 2026 adalah meningkatkan pendapatan masyarakat, peningkatan mitigasi bencana, terwujudnya rasa aman yang dapat menjadikan masyarakat untuk bebas beraktivitas, serta terwujudnya toleransi antar umat beragama dan kesetaraan gender, serta memperhatikan visi dan misi Kepala Daerah terpilih.

Selain itu, arah kebijakan Pembangunan juga memperhatikan RPJPD Kabupaten Kendal Tahun 2025-2026 dengan prioritas pada “Penguatan Kendal Berkarakter” di periode pertama RPJPD (2025-2029). Arah kebijakan ini diprioritaskan pada :

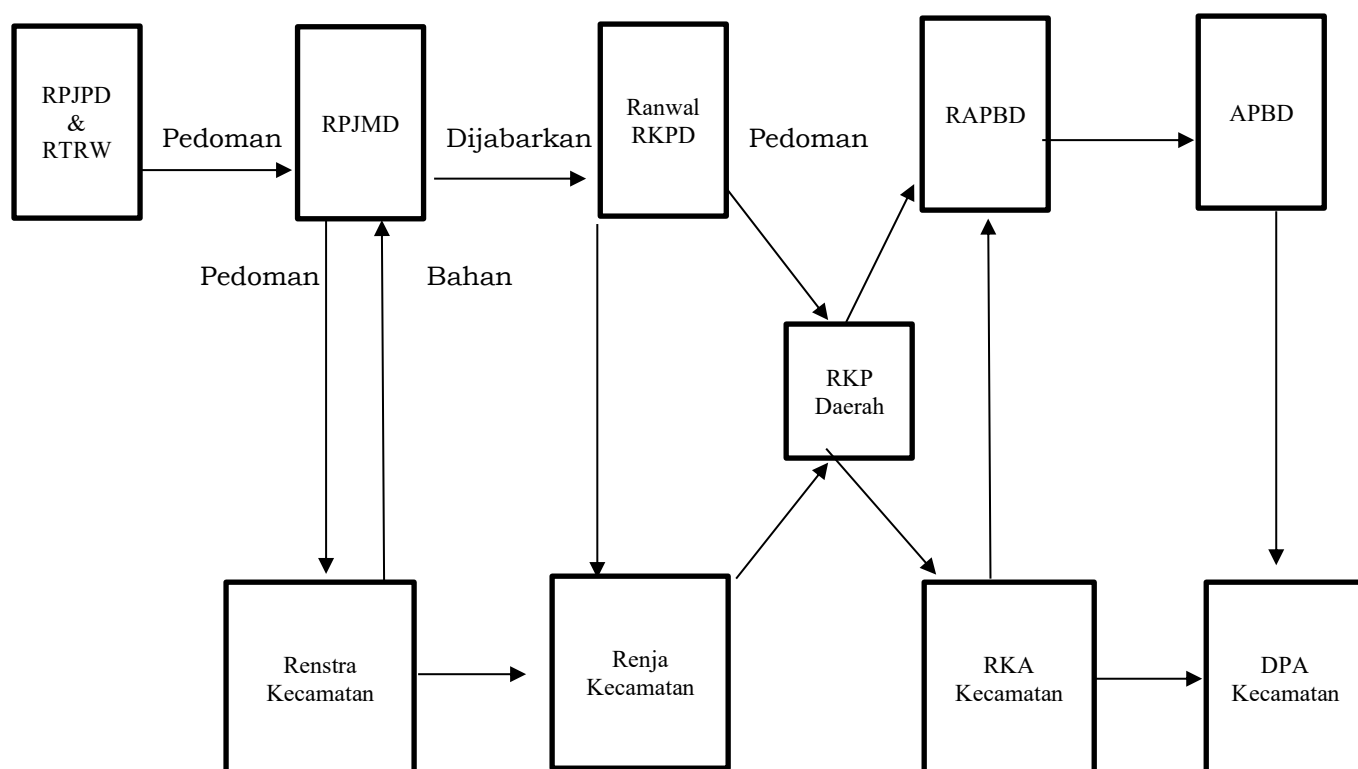
1. Penguatan hilirisasi dan modernisasi sektor perekonomian, pemerataan Pembangunan wilayah, penguatan kualitas infrastruktur dan konjektivitas wilayah yang difokuskan pada pusat pertumbuhan ekonomi baru dan pusat pariwisata.
2. Penguatan peningkatan kualitas dan pemerataan Pendidikan, peningkatan derajat Kesehatan, peningkatan budaya literasi Masyarakat, pengendalian laju penduduk, peningkatan peran pemuda dalam Pembangunan, peningkatan kualitas keluarga serta pemajuan budaya.
3. Penguatan penanganan kemiskinan, perluasan kesempatan kerja dan peningkatan kualitas tenaga kerja dan pencari kerja, ketercukupan pangan dan penguatan pembangunan desa,
4. Penguatan reformasi birokrasi, riset dan inovasi daerah.

5. Penguatan kualitas lingkungan hidup.

1.1.1. Keterkaitan Antara Renja SKPD dengan Dokumen Perencanaan lainnya

Rencana Kerja SKPD sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan di lingkup Satuan Kerja merupakan penjabaran dari Renstra SKPD yang merupakan rencana pembangunan jangka waktu lima tahunan. Seluruh dokumen tersebut merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan dan merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu. Karena sistem perencanaan pembangunan merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu, maka seluruh tahapan dan dokumen-dokumen yang dihasilkan harus menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara satu dengan yang lainnya.

KETERKAITAN ANTAR DOKUMEN PERENCANAAN



1.2 Landasan hukum

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang – Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

- 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang – Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2011 Nomor 20 Seri E No. 11, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Kendal Nomor 84) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2020 tentang

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 198);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 seri D No.1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 219);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 214);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 241);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pageruyung Kabupaten Kendal Tahun 2026 adalah tersusunnya dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja serta sebagai perangkat untuk mencapai harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bagi Kecamatan Pageruyung dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama kurun waktu 2026.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Pageruyung Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Sebagai pedoman bagi Kecamatan Pageruyung dalam menentukan prioritas Program dan Kegiatan Tahun 2026.
2. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Kecamatan Pageruyung dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi.
3. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Kecamatan Pageruyung untuk memahami Arah Kebijakan, Program dan Kegiatan Operasional Tahun 2026, dengan cara demikian diharapkan akan dapat dijaga keterkaitan antara perencanaan penganggaran dan penyusunan anggaran sehingga terwujud anggaran berbasis kinerja.
4. Mensinkronkan dan mensinergikan program dan kegiatan Kecamatan Pageruyung tahun 2026 dengan target dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana terumus dalam dokumen RKPD Kabupaten Kendal Tahun 2026;
5. Menjabarkan tentang gambaran umum daerah sekarang dan yang ingin dicapai pada tahun 2026 kedepan sekaligus tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan tercapinya misi dan visi kepala daerah;

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rancangan Akhir Rencana Kerja Kecamatan Pageruyung Tahun 2026 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan

Berisi mengenai gambaran umum penyusunan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah.

Bab II. Hasil Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan, kajian terhadap capaian kinerja pelayanan perangkat daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan, isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan

fungsi perangkat daerah, review terhadap terhadap Rancangan RKPD serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Berisi ulasan tentang perumusan tujuan dan sasaran yang didasarkan atas penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah, rumusan isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra perangkat daerah serta uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan program dan kegiatan.

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bagian ini memaparkan rencana kerja yang meliputi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Perangkat Daerah pada kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran beserta kebutuhan pendanaannya.

Bab V Penutup

Berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Dalam penyusunan program dan kegiatan telah ditetapkan indikator kinerja program (*outcome*) dan kegiatan (*output*) serta target kinerja capaian program/kegiatan maupun realisasi. Tahun 2024 Kecamatan Pageruyung melaksanakan 6 program dan 13 kegiatan. Kegiatan-kegiatan tersebut dialokasikan sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Tingkat capaian target kinerja program/kegiatan yang telah ditetapkan sampai triwulan keempat tahun 2024 dapat terealisasi rata-rata 86,39%. Sedangkan tingkat capaian kinerja program/kegiatan rutin menunjukkan kinerja yang baik dan tercapai 85,87%. Kegiatan telah tercapai 100%.

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun lalu (Tahun $n-2 = 2024$) berdasarkan target indikator kinerja program tahun 2024 adalah sebagai berikut :

a. Capaian Kinerja Program sesuai target kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

Jumlah program Tahun 2024 ada 6 program, sebagai berikut :

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Target dari program tersebut adalah Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Perangkat Daerah sebesar 100% dan terealisasi sebesar 85,87%. Kemudian Anggaran dalam melaksanakan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tersebut sebesar Rp.2.466.475.727,00 terealisasi sebesar Rp. 2.117.877.877,00 atau tingkat capaian kinerja sebesar 85,87%.

- 2) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Target dari Program tersebut adalah Persentase pelaksanaan pelimpahan kewenangan kecamatan sebesar 88,02% dan terealisasi sebesar 19.700.000%. Kemudian Anggaran dalam melaksanakan Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik tersebut sebesar Rp 19.700.000,00 terealisasi sebesar Rp 17.340.000,00 atau tingkat capaian kinerja sebesar 88,02%.

3) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Target dari Program tersebut adalah Persentase aspirasi masyarakat yang diakomodir dalam RKPD sebesar 100% terealisasi sebesar 91% atau tingkat capaian kinerja sebesar 90,97%. Kemudian Anggaran dalam melaksanakan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan tersebut sebesar Rp 50.895.000,00 terealisasi sebesar Rp 46.299.210,00 atau tingkat capaian kinerja sebesar 90,97%.

4) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Target dari Program tersebut adalah Persentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditangani 100% dan terealisasi sebesar 100% atau tingkat capaian kinerja sebesar 99,54%. Kemudian Anggaran dalam melaksanakan Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum tersebut sebesar Rp 101.028.000,00 terealisasi sebesar Rp 100.563.454,00 atau tingkat capaian kinerja sebesar 99,54%.

5) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Target dari Program tersebut adalah Persentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditangani 100% dan terealisasi sebesar 90% atau tingkat capaian kinerja sebesar 90,56%. Kemudian Anggaran dalam melaksanakan Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum tersebut sebesar Rp 29.385.000,00 terealisasi sebesar Rp 26.610.050,00 atau tingkat capaian kinerja sebesar 90,56%.

6) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Target dari Program tersebut adalah Persentase penyusunan APBDes tepat waktu sebesar 100% dan terealisasi sebesar 79% atau tingkat capaian kinerja sebesar 78,99%. Kemudian Anggaran dalam melaksanakan program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik tersebut sebesar Rp 58.900.000,00 terealisasi sebesar Rp. 46.527.500,00 atau tingkat capaian kinerja sebesar 78,99%.

b. Capaian Target Kinerja Keluaran Kegiatan.

Kegiatan Tahun 2024 jumlahnya ada 13 Kegiatan, sebagai berikut:

1) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Target dari Kegiatan tersebut adalah Persentase ketercapaian Perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah 100% dan terealisasi sebanyak 40% atau tingkat capaian kinerja sebesar 40,60%. Kemudian Anggaran dalam melaksanakan Kegiatan tersebut sebesar Rp 6.540.000,00 terealisasi sebesar Rp 2.655.000,00 atau tingkat capaian kinerja sebesar 40,60%.

2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Target dari Kegiatan tersebut adalah Persentase capaian kinerja keuangan perangkat daerah selama 14 bulan dan terealisasi sebesar 14 bulan atau tingkat capaian kinerja 100%. Kemudian Anggaran dalam melaksanakan Kegiatan tersebut sebesar Rp 2.094.742.978,00 terealisasi sebesar Rp 1.820.392.446,00 atau tingkat capaian kinerja sebesar 86,90%.

3) Administrasi Umum Perangkat Daerah

Target dari Kegiatan tersebut adalah Persentase capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah selama 12 bulan dan terealisasi sebesar 12 bulan atau tingkat capaian kinerja sebesar 100%. Kemudian Anggaran dalam melaksanakan Kegiatan tersebut sebesar Rp. 185.829.749,00 terealisasi sebesar Rp. 164.556.426,00 atau tingkat capaian kinerja sebesar 88,55%.

4) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Target dari Kegiatan tersebut adalah Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selama sebanyak 12 bulan dan terealisasi selama 12 bulan atau tingkat capaian kinerja sebesar 67,66%. Kemudian Anggaran dalam melaksanakan Kegiatan tersebut sebesar Rp. 119.060.000,00 terealisasi sebesar Rp. 80.556.005,00 atau tingkat capaian kinerja sebesar 67,66%.

5) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Target dari Kegiatan tersebut adalah Persentase capaian kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah dengan jumlah gedung yang diperbaiki 2 unit dan terealisasi sebesar 2 unit atau tingkat capaian kinerja sebesar 82,45%. Kemudian Anggaran dalam melaksanakan Kegiatan tersebut sebesar Rp. 60.303.000,00 terealisasi sebesar Rp. 49.718.000,00 atau tingkat capaian kinerja sebesar 82,45%.

6) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat

Target dari Kegiatan tersebut adalah Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan dengan target 42 orang tercapai 42 orang atau tingkat capaian kinerja sebesar 100%. Kemudian Anggaran dalam melaksanakan Kegiatan tersebut sebesar Rp. 19.700.000,00 terealisasi sebesar Rp. 17.340.000,00 atau tingkat capaian kinerja sebesar 88,02%.

7) Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Target dari Kegiatan tersebut adalah Jumlah koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa sebanyak 14 desa dan terealisasi sebesar 14 desa atau tingkat capaian kinerja sebesar 100%. Kemudian Anggaran dalam melaksanakan Kegiatan tersebut sebesar Rp. 50.895.000,00 terealisasi sebesar Rp. 46.299.210,00 atau tingkat capaian kinerja sebesar 90,97%.

8) Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

Target dari Kegiatan tersebut adalah Jumlah pembinaan anggota linmas sebanyak 30 orang linmas dan terealisasi 30 orang atau tingkat capaian kinerja sebesar 100%. Kemudian Anggaran dalam melaksanakan Kegiatan tersebut sebesar Rp. 95.328.000,00 terealisasi sebesar Rp. 95.063.454,00 atau tingkat capaian kinerja sebesar 99,72%.

9) Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Target dari Kegiatan tersebut adalah Jumlah desa yang dimonitor dalam kegiatan pengawasan wilayah sebanyak 14 desa dan terealisasi 14 desa atau tingkat capaian kinerja sebesar 100%. Kemudian Anggaran dalam melaksanakan Kegiatan tersebut sebesar Rp. 5.700.000,00 terealisasi sebesar Rp. 5.500.000,00 atau tingkat capaian kinerja sebesar 96,49%.

10) Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Target dari Kegiatan tersebut adalah Jumlah desa yang difasilitasi dalam kegiatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa sebanyak 14 desa dan terealisasi 14 desa atau tingkat capaian kinerja sebesar 78,99%. Kemudian Anggaran dalam melaksanakan Kegiatan tersebut sebesar Rp. 58.900.000,00 terealisasi sebesar Rp. 46.527.500,00 atau tingkat capaian kinerja sebesar 78,99%.

11) Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa.

Target dari Kegiatan tersebut adalah Jumlah desa yang difasilitasi dalam kegiatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa sebanyak 14 desa dan terealisasi 14 desa atau tingkat capaian kinerja sebesar 100%. Kemudian Anggaran dalam melaksanakan Kegiatan tersebut sebesar Rp. 26.400.000,00 terealisasi sebesar Rp. 23.960.000,00 atau tingkat capaian kinerja sebesar 90,76%.

12) Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa.

Target dari Kegiatan tersebut adalah Jumlah desa yang difasilitasi dalam kegiatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa sebanyak 14 desa dan terealisasi 14 desa atau tingkat capaian kinerja sebesar 100%. Kemudian Anggaran dalam melaksanakan Kegiatan tersebut sebesar Rp. 23.500.000,00 terealisasi sebesar Rp. 20.517.500,00 atau tingkat capaian kinerja sebesar 87,31%.

13) Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

Target dari Kegiatan tersebut adalah Jumlah desa yang difasilitasi dalam kegiatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa sebanyak 14 desa dan terealisasi 8,89% desa atau tingkat capaian kinerja sebesar 9%. Kemudian Anggaran dalam melaksanakan Kegiatan tersebut sebesar Rp. 4.500.000,00 terealisasi sebesar Rp. 400.000,00 atau tingkat capaian kinerja sebesar 8,89%. Belum terlaksana semua karena belum ada pengangkatan kepala desa.

Adapun Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun sebelumnya serta tingkat capaian Rencana Strategis dapat dilihat pada **Tabel T-C.29** berikut:

Tabel 2.1

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024
Provinsi Jawa Tengah Kabupaten Kendal**

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Pageruyung

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	)Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian realisasi target renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Prosentase terpenuhinya layanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	100	98	100	96	96	100	100	100
7	01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase ketercapaian perencanaan dan keuangan perangkat daerah	4	0	0	0	100	0	0	75
7	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase capaian kinerja keuangan perangkat daerah	100	100	100	100	100	100	100	75
7	01	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	100	100	100	100	100	100	100	75
7	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah	100	100	100	100	100	100	100	75
7	01	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase capaian kegiatan pengadaan barang milik daerah	100	100	0	0	0	0	0	75

7	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase pemenuhan jasa penunjang	100	100	100	100	100	100	100	75
7	01	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase capaian kegiatan pemeliharaan barang milik daerah	100	100	100	100	100	100	100	75
7	01	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Prosentase pelaksanaan pelimpahan kewenangan kecamatan	100	100	100	100	100	100	100	75
7	01	02	2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Prosentase kegiatan urusan pemerintahan yang dilimpahkan	12	12	12	12	100	12	12	75
7	01	03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELURAHAN	Prosentase aspirasi masyarakat yang diakomodir dalam RKPD	12	12	12	12	100	12	12	75
7	01	03	2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa	14 kali	14 kali	14	14	100	14	14	75
7	01	04		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Prosentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditangani	100	100	100	100	100	100	100	75
7	01	04	2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	12 kali	12 kali	12	12	100	100	12	75
7	01	04	2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah koordinasi dengan Satpol PP	14	14	14	14	200	14	14	75

	01	06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Prosentase penyusunan APBDes tepat waktu	12	12	12	12	100	12	12	75
7	01	06	2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang difasilitasi pembinaan, pengawasan pemerintahan desa	14 Desa	14 Desa	14	14	100	14	14	75

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Semua program dan kegiatan tahun 2025 telah terealisasi sesuai dengan target yang diusulkan (100%) secara fisik, dan realisasi anggaran tercapai 53.05 %

2. Realisasi program/kegiatan tahun 2025 yang terealisasi sesuai dengan target kinerja 100% dapat dilihat sebagaimana tabel dibawah.

Tabel 2.2
Capaian Kinerja Tahun 2025

No	Program/Keg/ Sub Keg	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		Persentase
			Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase terpenuhinya layanan umum,kepegawaian dan keuangan perangkat Daerah	100	88	88
a	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian Perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah	4 dok	4 dok	100
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	2 dok	2 dok	100
b	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase capaian kinerja keuangan perangkat daerah	100	100	100
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan penyediaan gaji dan tunjangan ASN	14 Bulan	14 Bulan	100
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil Penyediaan Administrasi Pelaksana Petugas ASN	12 dok	12 dok	100
c	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah	100	100	100
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	12	12	100
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	12	12	100

	Penyediaan Barang dan Penggandaan Cetakan dan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12	12	100
	Penyediaan Bahan dan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan perpu	12	12	100
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah bulan penyediaan BBM dan perjalanan dinas	12	12	100
d	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase capaian kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	0	0	0
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	5 unit	5 unit	100
e	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100	100	100
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah belanja materai	300	300	100
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan belanja rekening listrik, air dan telpon	12	12	100
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa peralatan dan peralatan kantor	12	12	100
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Belanja jasa tenaga penunjang kegiatan kantor	5 orang	5 orang	100
f	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase capaian kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100	100	100
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung yang di rehab dan diperbaiki	5 unit	5 unit	100
g	Penataan Organisasi	Prosentase terpenuhinya pelayanan umum	100	100	100
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase pelaksanaan pelimpahan kewenangan kecamatan	100	100	100

a	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan	100	100	100
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah dokumen perijinan	14	14	100
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase aspirasi masyarakat yang diakomodir dalam RKPD	100	100	100
a	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa	14	14	100
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah desa yang mengikuti kegiatan musrenbang	14	14	100
	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	1 Dok	1 Dok	100
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Monitoring dan evaluasi kegiatan efektifitas pemberdayaan masyarakat desa	14	14	100
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditangani	100	99	100
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	12	12	100
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah desa yang dimonitor	14	14	100
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah koordinasi	12	12 kali	100

	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100
5	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase penyusunan APBDes tepat waktu	100	90	100
a	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam kegiatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	14	14	100
	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah APBDes yang disusun	14	14	100
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang difasilitasi	14	14	100
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah desa yang difasilitasi	14	14	100
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah desa yang difasilitasi	14	14	100

3. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya / terpenuhinya target kinerja program/kegiatan.

- Masih belum tepat waktu dalam pengadministrasian pengelolaan keuangan.
- Masih adanya kegiatan pembangunan fisik maupun non fisik yang belum tercapai 100%
- Keterbatasan fasilitas dan fasilitasi dari dinas terkait sehingga kegiatan dilaksanakan dengan memaksimalkan SDM yang tersedia untuk dapat mencapai hasil yang maksimal

- Adanya regulasi kebijakan yang berubah-ubah dalam waktu yang singkat sehingga pelaksanaan program dan kegiatan mengalami perubahan yang terjadi dengan memakan waktu yang lama.
 - Adanya kegiatan atau aturan-aturan baru yang harus disampaikan sehingga menimbulkan tidak efisiensinya waktu pelaksanaan kegiatan.
 - Terkendalanya tertib administrasi pemerintah desa.
4. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra OPD. Target capaian program Renstra tahun 2021-2026 belum tentu sama dengan target capaian program dan kegiatan rencana kerja (renja) sehubungan dengan perkembangan kebutuhan baik dari segi anggaran maupun kegiatan di wilayah.
5. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi factor-faktor penyebab tersebut adalah;
1. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran untuk program/kegiatan lebih difokuskan pada prioritas kegiatan sesuai visi misi daerah dan memaksimalkan anggaran yang tersedia.
 2. Melaksanakan monitoring dan apel kegiatan pengelolaan keuangan serta melaksanakan kegiatan monitoring kegiatan Pembangunan fisik maupun non fisik berupa monev secara langsung.

2.2. Kajian capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator yang ditentukan dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) maupun indikator kinerja kunci

Berdasarkan Peraturan Bupati Kendal Nomor 25 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 77 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pada Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Kendal. Pemerintah Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Sesuai dengan Ayat (1) Pasal 3 Peraturan Bupati Kendal Nomor 25 Tahun 2021:

- 1) Camat dalam memimpin Kecamatan bertugas:

1. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
2. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang meliputi:
 1. Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa /Kelurahan dan Kecamatan;
 2. Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan;
 3. Efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
 4. Pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada Bupati;
3. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, meliputi:
 1. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan;
 2. Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat; dan
 3. Pelaporan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban kepada Bupati;
 4. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati, meliputi :
 5. Sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang – undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
 6. Pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang – undangan di wilayah Kecamatan kepada Bupati;

4. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, meliputi:
 1. Sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertical yang terkait;
 2. Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta; dan
 3. Pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Bupati;
5. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat daerah di tingkat Kecamatan, meliputi:
 1. Sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dengan perangkat daerah dan instansi vertical terkait;
 2. Efektivitas penyelenggaraan, kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan; dan
 3. Pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan kepada Bupati;
6. Membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan;
7. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Pemerintahan Daerah kabupaten yang ada di Kecamatan, meliputi:
 1. Perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
 2. Fasilitas percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
 3. Efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
 4. Pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; dan

8. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.
- 2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati :
 - a. Untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; dan
 - b. Untuk melaksanakan tugas pembantuan.
- 3) Sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas pelayanan perizinan dan non perizinan.
- 4) Pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan kriteria proses sederhana, objek perizinan berskala kecil, tidak memerlukan kajian teknis yang kompleks dan tidak memerlukan teknologi tinggi.
- 5) Pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui pelayanan terpadu dan dikembangkan sebagai inovasi pelayanan public sesuai dengan ketentuan peraturan – undangan;
- 6) Pelayanan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan kriteria berkaitan dengan pengawasan terhadap objek perizinan, kegiatan berskala kecil dan pelayanan langsung pada masyarakat yang bersifat rutin.
- 7) Pelimpahan sebagian urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan ayat (6) dilakukan berdasarkan pemetaan pelayanan public sesuai dengan karakteristik Kecamatan dan/atau kebutuhan masyarakat setempat.
- 8) Tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh Camat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Camat mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang –

undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;

- b. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
- g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang – undangan;
- h. Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah kabupaten yang ada di kecamatan; dan
Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, lebih detail tentang pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Pageruyung dapat dilihat dari Tabel 2.3 berikut.

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Kecamatan Pageruyung Kabupaten Kendal

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah			Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13
1	Prosentase terpenuhinya layanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah			100	100	100	100	100	100	100	
2	Prosentase ketercapaian perencanaan dan keuangan perangkat daerah			100	100	100	100	100	100	100	
3	Prosentase capaian kinerja keuangan perangkat daerah			100	100	100	100	100	100	100	
4	Prosentase capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah			100	100	100	100	100	100	100	
5	Prosentase pemenuhan jasa penunjang			100	100	100	100	100	100	100	
6	Prosentase capaian kegiatan pengadaan barang milik daerah			0	0	0	0	0	75	75	
7	Prosentase capaian kegiatan pemeliharaan barang milik daerah			100	100	100	100	100	100	100	
8	Prosentase terpenuhinya layanan umum			100	100	100	100	100	100	100	

9	Prosentase pelaksanaan pelimpahan kewenangan kecamatan			100	100	100		100	100	100	100	
10	Prosentase kegiatan urusan pemerintahan yang dilimpahkan			100	100	100		100	100	100	100	
11	Prosentase aspirasi masyarakat yang diakomodir dalam RKPD			100	100	100		100	100	100	100	
12	Jumlah koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa			12 kali	12 kali	12 kali		12 kali	12 kali	12 kali	12 kali	
13	Prosentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditangani			100	100	100		100	100	100	100	
14	Jumlah koordinasi dengan Satpol PP			12 kali	12 kali	12 kali		12 kali	12 kali	12 kali	12 kali	
15	Jumlah koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum			12 kali	12 kali	12 kali		12	12	12 kali	12 kali	
16	Prosentase penyusunan APBDes tepat waktu			100	100	100		90	100	100	100	
	Jumlah desa yang difasilitasi pembinaan, pengawasan pemerintahan desa			14 Desa	14 Desa	14 Desa		14 Desa	14 Desa	14 Desa	14 Desa	

2.3 Prestasi yang dicapai pada tahun 2023 - 2024

Dalam kurun waktu tahun 2023 - 2024 Kecamatan Pageruyung memperoleh beberapa prestasi, sebagai berikut :

1. Penghargaan Juara II Kecamatan dengan Persentase Evaluasi Desa Pilot Project Keluarga sehat Tangguh dan Tanggap Bencana Kabupaten Kendal Tahun 2023.
2. Juara II Posyandu Tingkat Kabupaten Kendal
3. Juara III Penyuluhan P4GN dan Tamu Kader PKK Tingkat Kab. Kendal tgl 10 Desember 2023
4. Juara III Dalam Pekan Raya Kendal (Kendal Exspo) Tk. Kabupaten Kendal tanggal 28 Juli 2024.

Gambar 1

Penghargaan Capaian juara II Pelaksana porsyandu terbaik Tk. Kabupaten



Gambar 2.
Juara III Penyuluhan P4GN dan Tamu Kader PKK Tingkat Kab.
Kendal
tgl 10 Desember 2023



Gambar 3
Penghargaan Kecamatan dengan Predikat Sangat Baik atas Laporan
Pengawasan Kearsipan Internal Kab. Kendal 19 Oktober 2023



Gambar 4

Juara III Pekan Raya Kendal Tingkat Kabupaten Kendal 2024



2.4. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah

Permasalahan yang ada di Kecamatan Pageruyung dalam melaksanakan tupoksinya adalah belum optimalnya pola koordinasi, fasilitasi dan motivasi lintas sektor di setiap seksi yang disebabkan oleh keterbatasan SDM dengan beban kerja yang banyak.

Sedangkan permasalahan khusus yang muncul dalam pelaksanaan tupoksi Kecamatan Pageruyung secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Bidang Pemerintahan

1}. Peraturan Desa

Dalam pembuatan Peraturan Desa masih banyak terjadi kendala antara lain masih kurangnya pemahaman Pemerintahan Desa terhadap pentingnya Produk Hukum bagi Pemerintah Desa, sehingga terkesan setiap pembuatan Peraturan Desa tidak berkualitas baik dari segi redaksi tata bahasa, nilai estetika, filosofi hukum dan esensi yang diatur.

Upaya-upaya yang telah dilakukan :

- Memberikan Sosialisasi kepada Pemerintah Desa tentang pedoman pembuatan Peraturan Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Sosialisasi Produk Hukum dengan sasaran Perangkat Desa dan Lembaga Desa;
- Pembinaan Anggota BPD selaku Badan Pengawas Desa yang membantu mengawasi jalannya pemerintahan desa.

2}. Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD)

Redaksional penyusunan Laporan Pertanggungjawaban ADD dan DD, mekanisme kerja Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) yang menunjang pelaporan ADD dan DD serta Landasan Hukum yang mendasari penyusunan laporan tersebut untuk seluruh Desa banyak yang belum dioperasionalkan secara

optimal. Upaya yang telah dilakukan mengenai Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban ADD dan DD dengan **Aplikasi Silakus**

3}. *Pembinaan dan peningkatan kapasitas SDM Perangkat Desa*

Masih perlu peningkatan sumber daya manusia Perangkat Desa serta sarana TIK yang memadai agar setiap program pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat dapat berjalan secara efektif dan efisien;

Upaya yang telah dilakukan :

- Mengadakan pembinaan peningkatan kapasitas SDM perangkat desa;
- Pembinaan administrasi desa dan aset desa;
- Peningkatan kinerja pemerintahan desa;
- Peningkatan sarana prasarana pendukung kinerja pemerintahan desa;
- Inovasi dibidang Peningkatan Kinerja Pemerintahan Desa.

4). *Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2025*

- Target PBB Tahun 2025 Kecamatan Pageruyung sebesar Rp.1.382.599.046,00 terealisasi sebesar Rp. 645.216.258,00 dengan capaian kinerja 46,6%. Dari 14 desa yang sudah lunas 100% sebanyak 0 desa.
- Sebagai upaya peningkatan pembayaran PBB dilaksanakan sosialisasi dan monitoring perkembangan pembayaran pajak ke desa-desa oleh Tim intensifikasi PBB
- Selalu memantau perkembangan realisasi PBB melalui sistem.

5). *Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa*

- Penyusunan APBDes sering tidak tepat waktu;
- Adanya perubahan regulasi kebijakan yang menghambat penyusunan APBDes
- Keterbatasan SDM Tim Penyusun APBDes
- Budaya cypaste

Upaya yang telah dilakukan :

- Membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Penyusunan APBDes bersama Tim Pendamping Desa dan Kecamatan;
- Mengevaluasi lebih dini konsep APBDes;
- Pendampingan ke desa-desa;
- Melaksanakan Rakor Tingkat Kecamatan dengan mengundang Tim Penyusun APBDes;
- Memaksimalkan sistem yang sudah ada untuk penyusunan APBDes tepat waktu;
- Melibatkan semua unsur yang terlibat dan berkompeten dalam penyusunan APBDes.

b. Bidang Pelayanan Publik

- Keterbatasan SDM;
- Masyarakat belum memahami sepenuhnya dengan sistem pelayanan publik berbasis IT;

Upaya yang telah dilakukan :

- Mengusulkan tambahan SDM;
- Memberikan pembekalan serta peningkatan kemampuan SDM staf yang membidangi pelayanan publik, baik melalui pelatihan formal maupun dalam koordinasi internal kecamatan dengan cara mendorong peningkatan kerjasama antar staf dan para kasi;
- Merencanakan kegiatan penataan organisasi dengan maksud untuk peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi

c. Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat

- Penyusunan RKPDes belum optimal
- Tim evaluasi yang dibentuk belum berjalan dengan optimal
- Belum tersosialisasikannya secara optimal pedoman pelaksanaan dan pedoman teknis evaluasi RAPB-Des dan LPP-Des
- Perlu dibangun sarana integritas pelaporan administrasi desa sinergis dengan kecamatan secara online, menuju desa mandiri dan maju;

- Pemerintahan Desa belum memfasilitasi untuk menampung kegiatan UMKM sebagai wadah bagi peningkatan ekonomi rakyat, sementara masih berjalan individual;
- Terkait dengan peningkatan destinasi wisata, untuk infrastruktur perlu ditingkatkan sebagai akses jalan masuk ke lokasi wisata

Upaya yang telah dilakukan:

- Berupaya untuk memfasilitasi terlaksananya sosialisasi, koordinasi antara masyarakat, lembaga yang berada di tingkat desa maupun kecamatan dengan *stake holder* atau dinas terkait;
- Memantau perkembangan program kerja yang turun sehingga dapat berjalan maksimal dan berdaya guna, berhasil guna dan tepat guna;
- Mengadakan pertemuan-pertemuan informal dengan tokoh masyarakat baik di tingkat kecamatan maupun di tingkat desa/kelurahan;
- Perlu dibangun sarana integritas pelaporan administrasi desa sinergis dengan kecamatan secara online, menuju desa mandiri dan maju;
- Melakukan koordinasi dan terobosan sebagai upaya peningkatan destinasi wisata;
- Inovasi Digitalisasi Desa Wisata.

d. Bidang Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan

- 1) Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan bagi warga dan lingkungan;
- 2) Kurang adanya koordinasi dan keterbukaan dengan para instansi maupun lembaga yang membidangi dengan para generasi muda yang terhimpun dalam karang taruna di masing-masing wilayah.

Upaya yang telah dilakukan :

- 1) Meningkatkan peran Institusi masyarakat dan meningkatkan penyuluhan oleh kesehatan dan dinas Sektoral tentang pentingnya menjaga kesehatan serta memanfaatkan momentum kegiatan-kegiatan dalam penyuluhan secara langsung, berkala dan terpadu utamanya kegiatan Posyandu serta memanfaatkan momentum dalam memecahkan masalah;
- 2) Meningkatkan koordinasi lintas sektoral dalam peningkatan kesempatan kerja sama dengan Kepala Desa untuk memaksimalkan peran kader dan institusi masyarakat dalam peningkatan penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya memaksimalkan pencapaian target keluarga sehat dan bebas stunting;
- 3) Telah dilakukan koordinasi dengan instansi/lembaga serta karang taruna yang ada di wilayah guna menumbuhkan kembangkan bakat dan kemampuan para generasi muda.

e. Bidang Keamanan dan Ketertiban Umum

- 1) Keterbatasan sarana prasarana dalam upaya meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum;
- 2) Minimnya kesadaran hukum (hak dan kewajiban) yang harus dipenuhi masyarakat dan pelaku usaha dalam hal ini pelayanan perijinan.
- 3) Permasalahan Pajak Bumi Bangunan yang kami hadapi di wilayah tidak terlalu signifikan hanya waktu yang diberikan untuk Pembetulan SPPT sangat pendek;
- 4) Wajib Pajak tidak bertempat tinggal di Desa tersebut (luar kota) sehingga sulit ditemui oleh petugas pemungut.

Upaya yang telah dilakukan :

- 1) Melakukan koordinasi dengan forkompincam dalam rangka peningkatan ketertiban masyarakat dengan keterbatasan sarpras

- 2) Mengadakan sosialisasi dan persuasif dengan PKL agar tertib, tidak mengganggu keamanan dan ketertiban sepanjang jalan protokol dan dapatnya berpindah lokasi berjualan;
- 3) Meningkatkan kesadaran hukum (hak dan kewajiban) yang harus dipenuhi masyarakat dan pelaku usaha dengan cara melakukan koordinasi dan sosialisasi dengan *stakeholder* terkait.
- 4) Mengusulkan pengadaan sarana prasarana pendukung komunikasi antara pemerintahan desa dan kecamatan.

2.4.1. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah terhadap capaian program nasional/internasional seperti NSPK, SPM, dan SDGs antara lain :

1. Pengurangan kemiskinan dan pengangguran;
2. Pelayanan Publik dan Perijinan;
3. Pembangunan Infrastruktur;
4. Tata Kelola Pemerintahan.

2.4.2. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah

Dalam upaya meningkatkan pelayanan publik, Kecamatan Pageruyung terdapat tantangan dan peluang sebagai berikut :

1. Proses administrasi yang Panjang dan kompleks seringkali memperlambat pelayanan kepada Masyarakat;
2. Keterbatasan tenaga kerja yang memiliki ketrampilan dan kompetensi dalam pelayanan publik dapat menghambat efektifitas pelayanan;
3. Banyak perangkat daerah yang masih bergantung pada cara manual dalam memberikan layanan, sehingga kurang efisien dan rawan kesalahan;

4. Banyak pegawai yang enggan beradaptasi dengan perubahan, baik dalam system kerja, teknologi, maupun kebijakan baru.

Sedangkan Peluang yang ada , adalah :

1. Penerapan teknologi digital, seperti layanan online dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pelayanan yang lebih baik;
2. Optimalisasi anggaran daerah dan dana desa dapat mempercepat Pembangunan serta meningkatkan kualitas pelayanan publik;
3. Dengan adanya otonom daerah, perangkat daerah memiliki fleksibilitas untuk menyesuaikan kebijakan dan pelayanan sesuai kebutuhan lokal.

2.4.6 Formulasi isu – isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan

- Penyederhanaan prosedur administrasi untuk mempercepat pelayanan publik;
- Digitalisasi layanan publik melalui sistem e-government dan integrasi data antar perangkat daerah
- Meningkatkan kapasitas ASN melalui pelatihan dan sertifikasi berbasis kompetensi.
- Perlu adanya regulasi daerah yang mendukung transformasi digital di sektor pemerintahan;
- Mendorong penggunaan aplikasi layanan terpadu agar masyarakat mendapatkan akses pelayanan yang cepat dan efisien.

2.5 Review Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah

a. Perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.

Terdapat proses perbandingan antara rancangan awal RKPD yang lebih bersifat makro dan mengacu pada dokumen kebijakan yang telah dirumuskan sebelumnya, sedangkan dengan hasil analisis yang kebutuhannya lebih dinamis karena berdasarkan kondisi aktual dan aspirasi masyarakat. Hasil Kebutuhan masyarakat dapat digunakan untuk menyempurnakan rancangan awal RKPD agar lebih tepat sasaran dan efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

b. Penjelasan mengenai proses yang dilakukan antara lain

Proses perbandingan ini dilakukan untuk memastikan bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang disusun benar-benar relevan, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat. Berikut adalah beberapa alasan utama antara lain sebagai berikut :

- Rancangan awal RKPD seringkali berbasis kebijakan jangka menengah (RPJMD) yang mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan perubahan atau tantangan baru di Masyarakat.
- Analisis kebutuhan dilakukan untuk mengidentifikasi masalah yang benar-benar dirasakan oleh Masyarakat, sehingga program dan kegiatan dapat lebih tepat sasaran.
- Anggaran daerah bersumber dari keuangan public terbatas, sehingga perlu dialokasikan secara efisien dan efektif.

Ada beberapa kegiatan/sub kegiatan yang mengalami perubahan antara Rancangan Awal RKPD dengan Hasil Analisis Kebutuhan, yaitu:

1). Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota pada kegiatan :

a) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah:

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah :
Rancangan Awal RKPD : Rp 7.260.000,00

- Hasil Analisis Kebutuhan : Rp 7.260.000,00
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah
 - Rancangan Awal RKPD : Rp 2.610.000,00
 - Hasil Analisis Kebutuhan : Rp 2.610.000,00
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - Rancangan Awal RKPD : Rp 4.650.000,00
 - Hasil Analisis Kebutuhan : Rp 4.650.000,00
- b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah :
 - Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN :
 - Rancangan Awal RKPD : Rp 2.054.528.516,00
 - Hasil Analisis Kebutuhan : Rp 2.957.862.480,00
- c) Administrasi Umum Perangkat Daerah :
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - Rancangan Awal RKPD : Rp 5.105.132,00
 - Hasil Analisis Kebutuhan : Rp 5.105.132,00
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor :
 - Rancangan Awal RKPD : Rp 14.999.200,00
 - Hasil Analisis Kebutuhan : Rp 14.999.200,00
 - Penyediaan Peralatan rumah Tangga :
 - Rancangan Awal RKPD : Rp 9.328.000,00
 - Hasil Analisis Kebutuhan : Rp 9.328.000,00
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor :
 - Rancangan Awal RKPD : Rp 39.112.100,00
 - Hasil Analisis Kebutuhan : Rp 39.112.100,00
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan :
 - Rancangan Awal RKPD : Rp 10.500.000,00
 - Hasil Analisis Kebutuhan : Rp 10.500.000,00
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD :
 - Rancangan Awal RKPD : Rp 75.546.000,00
 - Hasil Analisis Kebutuhan : Rp 109.789.249,00
- e) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah :
 - Pengadaan mebel :
 - Rancangan Awal RKPD : Rp 10.000.000,00

- Hasil Analisis Kebutuhan : Rp 17.000.000,-
- Pengadaan peralatan dan mesin lainnya :
 - Rancangan Awal RKPD : Rp 12.500.000,-
 - Hasil Analisis Kebutuhan : Rp 24.000.000,-
- f) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan jasa surat menyurat :
 - Rancangan Awal RKPD : Rp 4.000.000,00
 - Hasil Analisis Kebutuhan : Rp 5.000.000,00
 - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik :
 - Rancangan Awal RKPD : Rp 40.720.000,00
 - Hasil Analisis Kebutuhan : Rp 40.720.000,00
 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Rancangan Awal RKPD : Rp 8.760.000,00
 - Hasil Analisi Kebutuhan : Rp 13.870.000,00
 - Penyediaan jasa pelayanan umum kantor :
 - Rancangan Awal RKPD : Rp 53.236.000,00
 - Hasil Analisis Kebutuhan : Rp 60.970.000,00
- g) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah :
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan :
 - Rancangan Awal RKPD : Rp 29.803.000,00
 - Hasil Analisis Kebutuhan : Rp 29.803.000,00
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya:
 - Rancangan Awal RKPD : Rp 1.000.000,00
 - Hasil Analisis Kebutuhan : Rp 2.000.000,00
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya :
 - Rancangan Awal RKPD : Rp 24.000.000,00
 - Hasil Analisis Kebutuhan : Rp 24.000.000,00
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya :

Rancangan Awal RKPD : Rp 4.500.000,00
Hasil Analisis Kebutuhan : Rp 4.500.000,00

2). Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

a) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

- Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan:

Rancangan Awal RKPD : Rp 10.900.000,--
Hasil Analisis Kebutuhan : Rp 19.700.000,--

3). Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

a) Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

- Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa :

Rancangan Awal RKPD : Rp 13.715.872,00
Hasil Analisis Kebutuhan : Rp 4.845.000,00

- Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan :

Rancangan Awal RKPD : Rp 10.000.000,00
Hasil Analisis Kebutuhan : Rp 10.000.000,00

b) Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan :

- Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

Rancangan Awal RKPD : Rp 27.500.000,00
Hasil Analisis Kebutuhan : Rp 16.350.000,00

4). Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum

a) Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum :

- Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan :

Rancangan Awal RKPD : Rp 8.350.000,00
Hasil Analisis Kebutuhan : Rp 5.700.000,00

b) Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah :

- Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia :

Rancangan Awal RKPD : Rp 83.304.000,00

Hasil Analisis Kebutuhan : Rp 95.328.000,00

5). Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

a) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah :

- Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa :

Rancangan Awal RKPD : Rp 11.425.000,00

Hasil Analisis Kebutuhan : Rp 9.685.000,00

6). Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

a) Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa :

- Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa :

Rancangan Awal RKPD : Rp 5.600.000,00

Hasil Analisis Kebutuhan : Rp 300.000,00

- Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa :

Rancangan Awal RKPD : Rp 16.261.100,00

Hasil Analisis Kebutuhan : Rp 26.400.000,00

- Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa :

Rancangan Awal RKPD : Rp 11.220.000,00

Hasil Analisis Kebutuhan : Rp 23.500.000,00

- Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa:

Rancangan Awal RKPD : Rp 5.734.000,00

Hasil Analisis Kebutuhan : Rp 4.200.000,00

- Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa:

Rancangan Awal RKPD : Rp 4.500.000,00

Hasil Analisis Kebutuhan : Rp 4.500.000,00

b. Penjelasan mengenai proses yang dilakukan antara lain

Proses perbandingan ini dilakukan untuk memastikan bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang disusun benar-benar relevan, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat. Berikut adalah beberapa alasan utama antara lain sebagai berikut :

- Rancangan awal RKPD seringkali berbasis kebijakan jangka menengah (RPJMD) yang mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan perubahan atau tantangan baru di Masyarakat.
- Analisis kebutuhan dilakukan untuk mengidentifikasi masalah yang benar-benar dirasakan oleh Masyarakat, sehingga program dan kegiatan dapat lebih tepat sasaran.
- Anggaran daerah bersumber dari keuangan public terbatas, sehingga perlu dialokasikan secara efisien dan efektif.

c. *Penjelasan mengenai temuan – temuan dan catatan penting terhadap perbedaan dengan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah*

Karena proses perencanaan bersifat dinamis, maka terjadi perbedaan antara rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan hasil analisis kebutuhan. Pagu indikatif yang terpasang dalam rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah dicermati kembali, dianalisis lagi apakah pagu indikatif tersebut sudah tepat dan sesuai dengan kebutuhan.

Dari hasil analisis tersebut disusun daftar skala prioritas. Untuk kegiatan/sub kegiatan yang menjadi prioritas utama, serta mempunyai peran yang signifikan dalam mencapai sasaran perangkat daerah apabila pagu indikatifnya masih kurang maka ditambah. Sedangkan kegiatan/sub kegiatan yang menjadi prioritas berikutnya bisa dikurangi untuk mendukung kegiatan/sub kegiatan yang menjadi prioritas utama.

Dengan adanya daftar skala prioritas maka terjadi perbedaan bertambah/berkurang antara rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan hasil analisis kebutuhan.

Secara lengkap review terhadap rumusan hasil Musrenbang RKPD Tahun 2024 dengan hasil analisa kebutuhan (materi RKPD Tahun 2024) Tabel 2.4 dan Tabel 2.5

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Pageruyung
Kabupaten Kendal

No.	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	
1	2	3	4	5	6	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	-	85	85,50	86	86,50	89,46	-	93	95	
2.	Nilai SAKIP	-	-	72	73	70	71	70,45	-	71	72	

Nilai SAKIP dan Nilai IKM tahun 2025 belum ada karena penilaian IKM dilakukan setiap satu tahun sekali.

Tabel 2.5
Review Terhadap Rancangan RKPD Tahun 2025
Kecamatan Pageruyung Kabupaten Kendal

Kecamatan Pageruyung

No.	Rancangan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Kec. Pageruyung	Prosentase terpenuhinya layanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	100	2.523.659.472	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Kec. Pageruyung	Prosentase terpenuhinya layanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	100	2.524.659.472	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Pageruyung	Prosentase ketercapaian perencanaan dan keuangan perangkat daerah	100	7.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Pageruyung	Prosentase ketercapaian perencanaan dan keuangan perangkat daerah	100	8.500.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Pageruyung	Prosentase capaian kinerja keuangan perangkat daerah	100	2.091.536.896	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Pageruyung	Prosentase capaian kinerja keuangan perangkat daerah	100	2.091.536.896	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Pageruyung	Prosentase capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah	100	146.600.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Pageruyung	Prosentase capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah	100	146.600.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec. Pageruyung	Prosentase pemenuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100	34.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec. Pageruyung	Prosentase pemenuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100	34.000.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec. Pageruyung	Prosentase pemenuhan jasa penunjang	100	88.000.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec. Pageruyung	Prosentase pemenuhan jasa penunjang	100	88.000.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Pageruyung	Prosentase capaian kegiatan pemeliharaan barang milik daerah	100	58.242.576	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Pageruyung	Prosentase capaian kegiatan pemeliharaan barang milik daerah	100	58.242.576	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kec. Pageruyung	Prosentase pelaksanaan pelimpahan kewenangan kecamatan	100	10.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kec. Pageruyung	Prosentase pelaksanaan pelimpahan kewenangan kecamatan	100	10.000.000	

	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kec. Pageruyung	Prosentase kegiatan urusan pemerintahan yang dilimpahkan	100	10.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kec. Pageruyung	Prosentase kegiatan urusan pemerintahan yang dilimpahkan	100	10.000.000	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELURAHAN	Kec. Pageruyung	Prosentase aspirasi masyarakat yang diakomodir dalam RKPD	100	14.500.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELURAHAN	Kec. Pageruyung	Prosentase aspirasi masyarakat yang diakomodir dalam RKPD	100	14.500.000	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec. Pageruyung	Jumlah koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa	100	47.400.000	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec. Pageruyung	Jumlah koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa	100	47.400.000	
	Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec. Pageruyung	Jumlah koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa	100	47.400.000	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec. Pageruyung	Jumlah koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa	100	47.400.000	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kec. Pageruyung	Prosentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditangani	100	108.000.000	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kec. Pageruyung	Prosentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditangani	100	108.000.000	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kec. Pageruyung	Jumlah koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	100	108.000.000	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kec. Pageruyung	Jumlah koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	100	108.000.000	
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kec. Pageruyung	Jumlah koordinasi dengan Satpol PP	100	95.400.000	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kec. Pageruyung	Jumlah koordinasi dengan Satpol PP	100	95.400.000	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kec. Pageruyung	Prosentase penyusunan APBDes tepat waktu	100	2.700.000	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kec. Pageruyung	Prosentase penyusunan APBDes tepat waktu	100	2.700.000	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Pageruyung	Jumlah desa yang difasilitasi pembinaan, pengawasan pemerintahan desa	100	2.700.000	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Pageruyung	Jumlah desa yang difasilitasi pembinaan, pengawasan pemerintahan desa	100	2.700.000	

2.6 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Kendal membuka akses yang luas kepada pemangku kepentingan dalam memberikan usulan pembangunan di daerahnya. Usulan rencana pembangunan dapat berasal Bottom Up yaitu usulan dari masyarakat melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) mulai dari tingkat Desa, Kecamatan dan tingkat Kabupaten Kendal. Selain itu usulan rencana pembangunan juga berasal dari usulan Top Down dari kunjungan kerja Bupati dan Reses DPRD.

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat yang diusulkan oleh pemangku kepentingan berdasarkan pada hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten Kendal yang mana penjangkaran kebutuhan masyarakat dilakukan melalui sistem E-Planning yang diajukan ke Kecamatan Pageruyung Kabupaten Kendal. Usulan kegiatan masyarakat selanjutnya akan diverifikasi oleh Kecamatan Pageruyung berdasarkan syarat teknis yang telah ditentukan. Dari usulan tersebut akan ditentukan prioritas usulan yang dapat diakomodir oleh Kecamatan Pageruyung Kabupaten Kendal sesuai dengan skala prioritas dan kebutuhan serta anggaran. Usulan masyarakat yang masuk kedalam RKPD dan Renja Kecamatan Pageruyung adalah usulan untuk. Adapun tabel hasil kajian usulan program dan kegiatan masyarakat tahun 2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.6
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2025 Kabupaten Kendal

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Pageruyung

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
		NIHIL			

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Kebijakan Provinsi

A. Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2026

Penyusunan rencana pembangunan daerah disusun untuk mendukung pencapaian Kebijakan Nasional. Maka dalam penyusunannya tidak lepas dari prioritas pembangunan Nasional. Prioritas Nasional Tahun 2026 yang terdapat dalam Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden dan Wakil Presiden adalah sebagai berikut :

1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia.
2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru.
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif.
4. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender serta Penguatan Peran Perempuan , Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis Sumber Daya Alam (SDA) untuk meningkatkan nilai tambah di Dalam Negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi , pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, Penyelundupan; dan
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, sertameningkatkan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

B. Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026

Dalam penyusunan rencana pembangunan daerah juga tidak lepas dari prioritas pembangunan Provinsi Jawa Tengah. Prioritas pembangunan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sector unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas;
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter dan adaktif serta inklusif dan merata;
3. Penguatan ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif;

C. Prioritas Pembangunan Kabupaten Kendal Tahun 2026

Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Kendal tahun 2026 adalah **“Sustainable Kendal”** dengan prioritas pada **“Peningkatan Ketahanan Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan”**. Arah kebijakan ini difokuskan pada peningkatan pendapatan masyarakat, peningkatan mitigasi bencana, terwujudnya rasa aman yang dapat menjadikan masyarakat untuk bebas beraktivitas, serta terwujudnya toleransi antar umat beragama dan kesetaraan gender.

Selain itu, arah kebijakan Pembangunan juga memperhatikan RPJPD Kabupaten Kendal Tahun 2025-2026 dengan prioritas pada **“Penguatan Kendal Berkarakter”** di periode pertama RPJPD (2025-2029). Arah kebijakan ini diprioritaskan pada:

1. Penguatan hilirisasi dan modernisasi sektor perekonomian, pemerataan pembangunan wilayah, penguatan kualitas infrastruktur dan konektivitas wilayah yang difokuskan pada pusat pertumbuhan ekonomi baru dan pusat pariwisata;
2. Penguatan peningkatan kualitas dan pemerataan pendidikan, peningkatan derajat keehatan, peningkatan budaya literasi masyarakat, pengendalian laju penduduk, peningkatan peran pemuda dalam pembangunan, peningkatan kualitas keluarga serta pemajuan budaya;
3. Penguatan penanganan kemiskinan, perluasan kesempatan kerja dan peningkatan kualitas tenaga kerja dan pencari kerja, ketercukupan pangan dan penguatan pembangunan desa;

4. Penguatan reformasi birokrasi, riset dan inovasi daerah;
5. Penguatan kualitas lingkungan hidup;

Dengan melihat pada RPJMD, RPJPD periode pertama dan visi misi Kepala Daerah terpilih, arah kebijakan pembangunan Kabupaten Kendal tahun 2026 ditekankan pada:

1. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan pengelolaan sampah;
2. Meningkatnya ketahanan daerah dalam penanganan bencana;
3. Meningkatnya kondusifitas wilayah;
4. Menurunnya kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka;
5. Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia;
6. Meningkatnya reformasi birokrasi;
7. Meningkatnya ketahanan pangan daerah;
8. Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah;
9. Meningkatnya sektor perekonomian daerah.

Adapun Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Kendal Tahun 2026 di antaranya sebagai berikut :

1. Peningkatan Ketahanan Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan
 - a. Mengedepankan upaya-upaya peningkatan kualitas lingkungan dalam pembangunan Kabupaten Kendal;
 - b. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup melalui pengujian kualitas air, udara, penanganan sampah, pengelolaan keaneragaman hayati
 - c. Mendorong Kabupaten Kendal menjadi berketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim;
 - d. Meningkatkan ketahanan daerah dalam penanganan bencana melalui peningkatan kualitas perencanaan penanganan bencana, peningkatan early warning system, dan peningkatan prasarana penanganan bencana; dan
 - e. Meningkatkan penanganan dan pengelolaan sampah.
2. Peningkatan kualitas infrastruktur yang mantap dan berkeadilan dalam rangka mewujudkan pembangunan daerah dan ekonomi yang merata.
 - a. Mendorong peningkatan kualitas dan keterpaduan infrastruktur;
 - b. Mendorong infrastruktur layak anak, lansia dan difabel;
 - c. Peningkatan kualitas infrastruktur jalan, drainase melalui Pembangunan dan rehabilitasi;

- d. Peningkatan kualitas irigasi melalui pembangunan rehabilitas irigasi sekunder sesuai kewenangan daerah;
 - e. Peningkatan akses air minum dan akses limbah domestik melalui peningkatan pembangunan sambungan langsung rumah, peningkatan PAMSINAS dan SANIMAS, pelayanan air minum dan penangan limbah sesuai SPM;
 - f. Peningkatan penangaanan Kumuh melalui peningkatan kualitas PSU di kawasan kumuh, pembangunan RTLH di daerah kumuh dan luar kumuh dalam rangka pencegahan kumuh, pembangunan RTLH sesuai dengan SPM;
 - g. Peningkatan pembangunan sesuai dengan RTRW melalui peningkatan pemahaman, peningkatan informasi RTRW dan peneggakan perda RTRW;
 - h. Meningkatnya konektivitas antar wilayah melalui peningkatan jaringan jalan yang memiliki trayek angkutan, meningkatkan sarana prasarana perhubungan, meningkatnya kualitas perlengkapan lalu lintas, meningkatnya manajemen lalu lintas serta meningkatnya teknologi dalam smart transportasi;
 - i. Mendorong penyediaan infrastruktur TIK bagi masyarakat pedesaan;
 - j. Mengkoneksikan kantong-kantong produksi dengan pasar/distribusi channel;
3. Peningkatan perekonomian berbasis pengembangan potensi unggulan daerah dan sumberdaya alam;
- a. Peningkatan kualitas industri pengolahan melalui pengembangan industry kecil, fasilitasi ijin usaha dan penataan sentra industri dengan potensi lokal;
 - b. Peningkatan kontribusi pariwisata dalam pendapatan daerah melalui pengembangan destinasi wisata yang sudah ada, penguatan dan pembentukan desa wisata berbasis potensi lokal dan peningkatan promosi pariwisata serta pengembangan ekonomi kreatif, serta pengembangan pariwisata;
 - c. Meningkatkan kualitas sektor pertanian melalui pengembangan bibit unggul tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan perkebunan, peningkatan sarana dan prasarana pertanian yang mendorong produksi pertanian, peningkatan lahan pertanian serta meningkatkan kapasitas

- petani baik pertanian konvensional maupun penggunaan metode pertanian modern;
- d. Peningkatan produksi perikanan melalui peningkatan kapasitas nelayan, pengembangan budidaya perikanan, peningkatan kapasitas pengolahan ikan;
 - e. Peningkatan kualitas perdagangan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan ekspor, penataan izin pelaku usaha, peningkatan kualitas pasar, dan penataan PKL serta perlindungan terhadap konsumen;
 - f. Peningkatan pelayanan penanaman modal melalui peningkatan kualitas pelayanan, pengembangan insentif investor dan promosi penanaman modal;
 - g. Meningkatkan ketahanan pangan melalui peningkatan ketersediaan pangan, keanekaragaman pangan, distribusi pangan serta peningkatan konsumsi yang bergizi dan seimbang;
 - h. Penurunan tingkat pengangguran melalui peningkatan penyerapan tenaga kerja, penciptaan tenaga kerja yang kompeten sesuai dengan permintaan investor di kawasan industri, peningkatan produktivitas tenaga kerja;
 - i. Peningkatan kualitas usaha mikro melalui pengembangan usaha mikro, pembinaan usaha mikro dan penguatan koperasi dalam membantu permodalan usaha mikro serta digitalisasi marketing;
4. Perwujudan tata kelola Pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan dan akuntabel didukung dengan konsep e-Government;
- a. Peningkatan birokrasi yang akuntabel melalui peningkatan kualitas perencanaan, meningkatkan proses partisipasi dengan meningkatkan peran RT/RW dalam musrenbang, pelaksanaan pembangunan, penanganan dan pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas APBD;
 - b. Peningkatan birokrasi yang kapabel pada peningkatan profesionalisme ASN melalui peningkatan kualitas, kinerja dan kedisiplinan ASN;
 - c. Peningkatan birokrasi yang kapabel melalui peningkatan Pembangunan berbasis elektronik, mendorong optimalisasi e- planning, e-monitoring, e-musrenbang, e-services, e-budgeting sebagai alat untuk mendorong pembangunan terintegrasi, peningkatan kualitas satu data dan mendorong keamanan arsip daerah serta kualitas persandian;

- d. Meningkatkan pelayanan publik melalui peningkatan kecepatan pelayanan, mengurangi pungli dan peningkatan sarana prasarana pelayanan.
5. Optimalisasi SDM di Kabupaten Kendal yang berdaya saing, berkarakter, dan Handal;
- a. Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan melalui penyelenggaraan beasiswa pada penduduk miskin, pengembangan kesetaraan untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah, dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan serta pengembangan sekolah sesuai dengan protokol kesehatan;
 - b. Pemajuan budaya melalui peningkatan pelestarian budaya baik benda maupun tak benda;
 - c. Peningkatan literasi pada masyarakat melalui peningkatan kualitas perpustakaan dan peningkatan minat baca; d. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan fasilitas, layanan kesehatan yang mudah diakses sesuai dengan SPM, penyediaan kualitas tenaga kesehatan, penyediaan jaminan Kesehatan untuk masyarakat, penyediaan kebutuhan farmasi di pelayanan, peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat;
 - e. Peningkatan kualitas kesehatan melalui pengendalian jumlah penduduk, dan peningkatan peserta KB;
 - f. Peningkatan peran pemuda dan olahraga melalui peningkatan prestasi pemuda dan olahraga;
 - g. Peningkatan kesetaraan dan keadilan gender melalui peningkatan PUG di semua perangkat daerah, peningkatan perlindungan perempuan dari kasus kekerasan, dan perdagangan, peningkatan pemenuhan hak anak dalam konsep Kabupaten layak anak dan perlindungan anak khusus.

Di samping program prioritas di atas, Kabupaten Kendal juga melaksanakan pembangunan yang bersifat *mainstreaming* yaitu pembangunan gender, *stunting* dan kemiskinan. Isu gender tidak hanya dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan pemberdayaan perempuan saja, tetapi dilaksanakan oleh hampir semua Perangkat Daerah. Penyelesaian kesetaraan dan keadilan gender dilakukan berdasarkan isu gender di masing-masing Perangkat Daerah dengan tidak mengubah struktur anggaran.

Isu *stunting* juga dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagaimana rencana aksi penanggulangan *stunting*. Penyebab terjadinya *stunting* dari ekonomi, social dan infrastruktur yang perlu juga mendapat dukungan dari Dana Desa.

Isu kemiskinan diselesaikan oleh banyak Perangkat Daerah. Dalam rangka penyelesaian kemiskinan, akan diselaraskan dengan dokumen Rencana Penanganan Kemiskinan Daerah. Isu kemiskinan termasuk didalamnya adalah pengentasan kemiskinan ekstrem yang sesuai dengan arahan Presiden, ditargetkan menuju 0% kemiskinan ekstrem pada tahun 2026.

Dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Pageruyung Tahun 2026 telah mengacu pada kebijakan dari pemerintah atasan, yaitu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Serta disinkronkan dengan arah pembangunan daerah. Hal ini bertujuan untuk menjaga sinergitas pelaksanaan pembangunan dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah. Adapun kegiatan dalam Rencana Kerja Kecamatan Pageruyung Tahun 2026 apabila disandingkan dengan kebijakan pusat dan provinsi diuraikan pada Tabel 3.1. sebagai berikut :

Tabel 3.1.

Persandingan antara Prioritas Nasional, Provinsi, Kabupaten dengan Usulan Rencana Kerja Tahun 2025

Kebijakan Pusat	Kebijakan Provinsi	Prioritas Pembangunan Kab. Kendal	Program/kegiatan dalam Renja 2025
Arah Kebijakan Pembangunan Nasional Tahun 2023 yang merupakan tahun keempat periode RPJMN 2020-2024, yang memiliki sasaran pembangunan jangka menengah yaitu, "Mewujudkan Masyarakat Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil, dan Makmur melalui Percepatan Pembangunan di Berbagai Bidang dengan Menekankan Terbangunnya Struktur Perekonomian yang Kokoh Berlandaskan Keunggulan Kompetitif di Berbagai Wilayah yang didukung oleh Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing.	Arah kebijakan pembangunan tahun 2025 Provinsi Jawa Tengah ditujukan pada "Perwujudan Masyarakat Jawa Tengah Yang Semakin Sejahtera Dan Berdikari", dengan prioritas daerah diarahkan pada Prioritas pembangunan	Arah kebijakan Pembangunan Kabupaten Kendal tahun 2025 adalah "Kendal Inclusive" dengan prioritas pada "Mewujudkan pembangunan daerah dan ekonomi yang merata dengan meningkatkan kualitas infrastuktur yang mantap dan berkeadilan.". Arah Kebijakan ini dengan fokus pada penguatan kualitas jalan, ketahanan daerah dalam penanganan bencana, peningkatan kualitas lingkungan terutama pengelolaan sampah yang terintegrasi dan peningkatan layanan angkutan jalan yang terintegrasi.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupatn/Kota

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tata kelola pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, berbasis elektronik dan bebas korupsi, dengan memberikan ruang yang luas bagi partisipasi masyarakat dalam proses perumusan hingga evaluasi kebijakan.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Dimana pada tahun 2026 mendatang kecamatan diharapkan dapat meningkatkan kinerjanya di bidang sebagaimana rencana yang sudah ditetapkan.

Tujuan dari penyusunan rencana kerja PD tahun 2026 adalah untuk melaksanakan sebagian wewenang tugas Kepala Daerah yang dilimpahkan kepada kecamatan, rencana kerja tersebut didukung dengan program dan kegiatan di bidang pelayanan administrasi perkantoran, bidang pelayanan publik, bidang pemberdayaan masyarakat desa, bidang ketentraman dan ketertiban umum serta di bidang pemerintahan desa.

Sedangkan sasaran program Kecamatan Pageruyung tahun 2026 secara umum adalah Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan.

3.3 Program dan Kegiatan

Pelaksanaan kinerja Kecamatan Pageruyung Kabupaten Kendal 2026 ditunjang dengan Belanja Tidak Langsung (belanja pegawai) dan belanja langsung (Belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal), dalam Rencana Kerja Kecamatan Pageruyung Tahun 2026 direalisasikan melalui program dan kegiatan sebagai berikut :

Belanja Langsung dan Tidak Langsung

Belanja Langsung dan Tidak Langsung meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang & Jasa dan Belanja Modal dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 2.726.383.727,- yang terbagi ke dalam beberapa program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota

- a) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 - a.2. Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya.
 - a.3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
- b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
 - b.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b.2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.
- c) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - c.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor.
- d) Administrasi Umum Perangkat Daerah;
 - d.1. Penyediaan Komponen Instalasi;
 - d.2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan;
 - d.3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
 - d.4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - d.5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - d.6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
- e) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - e.1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - e.2. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan lainnya.
- f) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
 - f.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
 - f.2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - f.3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - f.4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor;
- g) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- g.1. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
 - a) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
 - a.1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha.
- 3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
 - a) Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa.
 - a.1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat di wilayah kecamatan;
 - b) Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
 - b.1. Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan
- 4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - a) Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - a.1. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan;
 - a.2. Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Toko Masyarakat.
 - b) Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
 - b.1. Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
- 5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - a) Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - a.1. Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
 - a.2. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa;
 - a.3. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa;

- a.4. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- a.5. Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
- a.6. Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- a.7. Koordinasi Pendampingan Desa di wilayahnya.

Adapun rumusan rencana program dan kegiatan Kecamatan Pageruyung Tahun 2026 dan Prakiraan maju Tahun 2026 akan disajikan pada Tabel 3.2 sebagai berikut :

Tabel 3.2

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026
dan Prakiraan Maju Tahun 2027
Kabupaten Kendal

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Pageruyung

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target	Kebutuhan	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	01				KECAMATAN				3.356.842.480,00				4.417.641.428,00
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA		Kec. Pageruyung		3.356.842.480,00				4.417.641.428,00
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase ketercapaian Perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah	Kec. Pageruyung	dokumen	1.722.500,00				13.000.000
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan penganggaran evaluasi yang tersusun		4 Dokumen	1.142.500,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			10.000.000
7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Penyusunan RKA-SKPD			0	Pendapatan Asli daerah (PAD)			0
7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan	Jumlah dokumen perencanaan			0	Pendapatan Asli			0

					Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	penganggaran evaluasi yang tersusun				Daerah (PAD)			
7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		12 Laporan	580.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			3.000.000,00
7	01	01	2.01	0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah							
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase capaian kinerja keuangan perangkat daerah		100 persen	2.959.702.480,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2.905.000.000,00
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		34 orang / bulan	2.957.862.480,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			2.900.000.000,00
7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		12 Laporan	1.840.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			5.000.000,00
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Perangkat Daerah		100 Persen	0	-			18.000.000,00
7	01	01	2.06	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapan		15 Paket	0	Pendapatan Asli daerah (PAD)			18.000.000,00
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase capaian kinerja administrasi umum Perangkat Daerah			173.753.150,00				254.000.000,00

7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kec. Pageruyung	7 paket	5.591.504,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			17.000.000,00
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kec. Pageruyung	27 paket	17.581.500,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			17.000.000
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kec. Pageruyung	4 Paket	11.822.800,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			15.000.000
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kec. Pageruyung	450 Paket	0	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			90.000.000,00
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kec. Pageruyung	2 Paket	14.290.400,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			25.000.000,00
7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan Bacaan dan Perundang-undangan yang disediakan	Kec. Pageruyung	12 Dokumen	0	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Pageruyung	12 laporan	124.466.946,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			90.000.000,00
7	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kec. Pageruyung	12 Dokumen	0	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase pemenuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Kec. Pageruyung	100 Persen	22.523.000,00				155.000.000,00

7	01	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Kec. Pageruyung						
7	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kec. Pageruyung						
7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	Kec. Pageruyung	100 Unit	9.000.0000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			35.000.000,00
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah unit Peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Kec. Pageruyung	10 Unit	13.523.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			120.000.000,00
7	01	01	2.07	0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Kec. Pageruyung	1 Unit	0	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Kec. Pageruyung	2 Unit	0	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
7	01	01	2.09	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kec. Pageruyung						
7	01	01	2.07	0011	Peliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kec. Pageruyung	0 unit	0	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0

7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kec. Pageruyung	100 Persen	91.040.000,00				201.000.000,00
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Pageruyung	12 laporan	5.000.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			6.000.000,00
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kec. Pageruyung	12 laporan	46.800.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			80.000.000,00
7	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kec. Pageruyung	12 laporan	7.100.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			40.000.000
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kec. Pageruyung	12 laporan	32.140.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			75.000.000,00
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase capaian kegiatan pemeliharaan barang milik daerah	Kec. Pageruyung	100 Persen	33.645.350,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			453.000.000,00
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kec. Pageruyung	17 Unit	13.962.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			70.000.000,00
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang	Kec. Pageruyung	0	0	Pendapatan asli			0

					Pemeliharaan, Pajak dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinan				Daerah (PAD)			
7	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Kec. Pageruyung	2 Unit	0	Pendapatan asli Daerah (PAD)			0
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang Dipelihara	Kec. Pageruyung	33 Unit	90.000.000,00	Pendapatan asli Daerah (PAD)			30.000.000,00
7	01	01	2.09	0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Kec. Pageruyung						
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Kec. Pageruyung	1 unit	19.683.350,00	Pendapatan asli Daerah (PAD)			0
7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kec. Pageruyung	1 Unit		Pendapatan asli Daerah (PAD)			350.000,00
7	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kec. Pageruyung	5 Unit		Pendapatan Asli Daerah (PAD)			
7	01	01	2.09	0011			Kec. Pageruyung						
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Kec. Pageruyung	100 Persen		Pendapatan Asli Daerah (PAD)			35.000.000,00

7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Pageruyung	100 Persen		Pendapatan Asli Daerah (PAD)			9.000.000,00
7	01	01	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Pageruyung	12 Laporan		Pendapatan Asli Daerah (PAD)			
7	01	01	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Pageruyung	14 Dokumen		Pendapatan Asli Daerah (PAD)			9.000.000,00
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kec. Pageruyung	100 Persen		Pendapatan Asli Daerah (PAD)			
7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Pageruyung	12 Laporan		Pendapatan Asli Daerah (PAD)			
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	jumlah kegiatan urusan pemerintahan yang dilimpahkan	Kec. Pageruyung			Pendapatan Asli Daerah (PAD)			26.000.000

7	01	02	2.04	0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	Kec. Pageruyung	14 Dokumen		Pendapata n Asli Daerah (PAD)			10.000.000,00
7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Pageruyung	2 Laporan		Pendapata n Asli Daerah (PAD)			16.000.000,00
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Kec. Pageruyung	33 Persen	21.056.000,00				115.000.000,00
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec. Pageruyung	Kec. Pageruyung	33 Persen	21.056.000,00				100.000.000,00
7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Pageruyung	14 Lembaga Kemasya rakat	2.950.000,00	Pendapata n Asli Daerah (PAD)			25.000.000,00
7	01	03	2.01	0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan	Jumlah Dokumen Singkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Kec. Pageruyung	14 Dokumen	18.106.000,00	Pendapata n Asli Daerah (PAD)			70.000.000
7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan	Kec. Pageruyung	14 Laporan	0	Pendapata n Asli			5.000.000,00

					Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				Daerah (PAD)			
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Terlaksana Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kec. Pageruyung	12 Laporan		Pendapatan Asli Daerah (PAD)			15.000.000,00
7	01	03	2.03	0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kec. Pageruyung	14 Lembaga Kemasyarakatan		Pendapatan Asli Daerah (PAD)			5.000.000,00
7	01	03	2.03	0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kec. Pageruyung	12 Laporan		Pendapatan Asli Daerah (PAD)			10.000.000,00
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Kec. Pageruyung	14 Laporan	41.050.000,00				140.400.000,00
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Kec. Pageruyung		9.250.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			140.400.000,00
7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Pageruyung	12 laporan	9.250.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			45.000.000,00
7	01	04	2.01	0002	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kec. Pageruyung	12 laporan					
7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan		Kec. Pageruyung	14 Laporan	31.800.000,00				95.400.000

					Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah								
7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kec. Pageruyung	12 laporan	31.800.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			95.400.000
7	01	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			42 Orang	5.250.000,00				50.000.000,00
7	01	5	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			42 Orang	5.250.000,00				50.000.000,00
7	01	05	2.01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka							

						Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia						
7	01	05	2.01	0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan kebangsaan dan Ketahanan nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	50 Orang	5.250.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			40.000.000
7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	0	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			10.000.000,00
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		14 Dokumen	7.100.000,00				78.241.428,00
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam kegiatan pembinaan pengawasan pemerintahan desa	14 Dokumen	7.100.000,00				78.241.428,00

7	01	06	2.01	0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kec. Pageruyung	14 Dokumen	0	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			18.241.428,00
7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec. Pageruyung	14 dokumen	0	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			25.000.000,00
7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kec. Pageruyung	14 dokumen	3.050.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			30.000.000,00
7	01	06	2.01	0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Kec. Pageruyung	14 dokumen					
7	01	06	2.01	0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kec. Pageruyung	2 Dokumen	150.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
7	01	06	2.01	0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Kec. Pageruyung	14 Dokumen	150.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			0
7	01	06	2.01	0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Kec. Pageruyung	14 dokumen	3.450.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)			5.000.000,00

7	01	06	2.01	0001 6	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kec. Pageruyung	14 dokumen	0	Pendapata n Asli Daerah (PAD)			0
7	01	06	2.01	0001 7	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kec. Pageruyung	14 Laporan	150.000,00	Pendapata n Asli Daerah (PAD)			0
7	01	06	2.01	0001 8	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Kec. Pageruyung	14 Laporan	150.000,00	Pendapata n Asli Daerah (PAD)			0

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program SKPD merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam RPJMD, selanjutnya dijabarkan SKPD kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan SKPD. Kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas, diharapkan dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran program yang telah direncanakan. Indikator kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan, merencanakan anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan program kebijakan, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan catatan untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Indikator kinerja juga merupakan ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan (ex ante), tahap pelaksanaan (on going), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (ex post).

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan suatu instrumen pertanggungjawaban yang terdiri dari berbagai indikator dan mekanisme kegiatan pengukuran, penilaian dan pelaporan kinerja secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas, fungsi dan misi organisasi.

Pada sektor publik seperti entitas pemerintah system akuntabilitas kinerja menghadapi masalah berupa sulitnya mengukur kinerja dan menentukan indikator kinerja yang tepat. Problematik tersebut timbul karena sektor public memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan sektor bisnis, terutama menyangkut output, outcome dan tujuan utama entitas. Output entitas pemerintahan sebagian besar berupa jasa pelayanan public yang sulit diukur kuantitas maupun kualitasnya.

Indikator kinerja Kecamatan Pageruyung yang mengacu pada tujuan dan sasaran Renstra adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Kecamatan Pageruyung dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Renstra.

KINERJA UTAMA DAN INDIKATOR KINERJA

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kecamatan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Skor
		Nilai SAKIP Kecamatan	Skor

Kelompok Sasaran adalah sekumpulan sasaran yang mempunyai tujuan interaksi satu sama lain untuk mencapai tujuan program dalam kurun waktu yang ditentukan.

Indikator Sasaran adalah alat ukur spesifik menggambarkan target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan yang dapat menunjukkan secara signifikan

mengenai keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran. Indikator Sasaran dilengkapi dengan target kuantitatif dan satuannya untuk mempermudah pengukuran pencapaian sasaran.

Pencapaian Sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan Realisasi Indikator Sasaran melalui media formulir Pengukuran Kinerja. Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis.

Pendanaan indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pendanaan indikatif selanjutnya akan dijabarkan ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya. Pencapaian target kinerja program (*outcome*) sebenarnya tidak hanya didukung oleh pendanaan yang bersumber dari APBD Kabupaten Kendal namun juga oleh sumber pendanaan lainnya (APBN, APBD Prov, dan sumber-sumber pendanaan lainnya).

Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Kecamatan Pageruyung Tahun 2026 sebagaimana tersebut dibawah :

Tabel 4.1
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kab.Kendal

Unit Organisasi : 7.01.0.000.0.00.14.0000

Kecamatan Pageruyung

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.000.0.00.14.0000

Kecamatan Pageruyung

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					KECAMATAN PAGERUYUNG			3.356.842.480							4.417.641.428	
7					UNSUR KEWILAYAHAN			3.356.842.480							4.417.641.428	
7	01				KECAMATAN			3.356.842.480							4.417.641.428	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	3.282.386.480						-	3.999.000.000	
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah, pelayanan umum, kepegawaian serta keuangan Perangkat Daerah	100 persen	1.722.500			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi	Peningkatan tata kelola pemerintahan, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan riset dan teknologi	Perangkat Daerah dan Masyarakat	-	13.000.000	

[illegible]

						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	580.000	Kab. Kendal, Pageruyung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Kolaboratif serta Stabilitas Pembangunan Daerah Optimalisasi SDM yang berdaya saing, berkarakter, dan handal	Perangkat Daerah dan Masyarakat		3.000.000	KECAMATAN PAGERUYUNG
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah, pelayanan umum, kepegawaian serta keuangan Perangkat Daerah	100 persen	2.959.702.480			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistik Peningkatan tata kelola pemerintahan, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan riset dan teknologi	Perangkat Daerah dan Masyarakat	-	2.905.000.000	
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	34 Orang/bulan	2.957.862.480	Kab. Kendal, Pageruyung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistik Peningkatan tata kelola pemerintahan, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan	Perangkat Daerah dan Masyarakat		2.900.000.000	KECAMATAN PAGERUYUNG

											publik serta peningkatan riset dan teknologi				
7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD										
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	1.840.000	Kab. Kendal, Pageruyung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Peningkatan tata kelola pemerintahan, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan riset dan teknologi	Perangkat Daerah dan Masyarakat		5.000.000	KECAMATAN PAGERUYUNG
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah, pelayanan umum, kepegawaian serta keuangan Perangkat Daerah	100 persen	-			-	Peningkatan tata kelola pemerintahan, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan riset dan teknologi	-	-	18.000.000
7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya										

						Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	15 Paket	-		Kab. Kendal, Pageruyung, Pageruyung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan riset dan teknologi	-		18.000.000	KECAMATAN PAGERUYUNG
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	173.753.150				-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Kolaboratif serta Stabilitas Pembangunan Daerah Peningkatan tata kelola pemerintahan, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan riset dan teknologi	-	-	254.000.000	
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor												
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 Paket	5.591.504		Kab. Kendal, Pageruyung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Kolaboratif serta Stabilitas Pembangunan Daerah Peningkatan tata kelola pemerintahan, reformasi birokrasi dan	-		17.000.000	KECAMATAN PAGERUYUNG

												peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan riset dan teknologi				
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor											
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	27 Paket	17.581.500	Kab. Kendal, Pageruyung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan riset dan teknologi	-		17.000.000	KECAMATAN PAGERUYUNG
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga											
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	11.822.800	Kab. Kendal, Pageruyung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Kolaboratif serta Stabilitas Pembangunan Daerah Peningkatan tata kelola pemerintahan, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan	-		15.000.000	KECAMATAN PAGERUYUNG

												riset dan teknologi				
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor											
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	450 Paket	-	Kab. Kendal, Pageruyung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Peningkatan tata kelola pemerintahan, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan riset dan teknologi	-		90.000.000	KECAMATAN PAGERUYUNG	
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan											
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	14.290.400	Kab. Kendal, Pageruyung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Peningkatan tata kelola pemerintahan, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik serta	-		25.000.000	KECAMATAN PAGERUYUNG	

											peningkatan riset dan teknologi				
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	124.466.946	Kab. Kendal, Pageruyung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan tata kelola pemerintahan, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan riset dan teknologi	-		90.000.000	KECAMATAN PAGERUYUNG
7	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD										
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	-	Kab. Kendal, Pageruyung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistik Peningkatan tata kelola pemerintahan, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik serta	-		-	KECAMATAN PAGERUYUNG

											peningkatan riset dan teknologi					
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah, pelayanan umum, kepegawaian serta keuangan Perangkat Daerah	100 persen	22.523.000			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Kolaboratif serta Stabilitas Pembangunan Daerah Peningkatan tata kelola pemerintahan, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan riset dan teknologi	-	-	155.000.000	
7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel											
						0	10 0	9.000.000	Kab. Kendal, Pageruyung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Kolaboratif serta Stabilitas Pembangunan Daerah Peningkatan tata kelola pemerintahan, reformasi birokrasi dan	-		35.000.000	KECAMATAN PAGERUYUNG

												peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan riset dan teknologi				
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	13.523.000	Kab. Kendal, Pageruyung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan tata kelola pemerintahan, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan riset dan teknologi	-		120.000.000	KECAMATAN PAGERUYUNG
7	01	01	2.07	0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud											
						Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	1 Unit	-	Kab. Kendal, Pageruyung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Peningkatan tata kelola pemerintahan, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas	-		-	KECAMATAN PAGERUYUNG

												pelayanan publik serta peningkatan riset dan teknologi				
7	01	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya											
						Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	-	Kab. Kendal, Pageruyung, Semua Kel/Desa	-	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Peningkatan tata kelola pemerintahan, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan riset dan teknologi	-		-	KECAMATAN PAGERUYUNG
7	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya											
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	-	Kab. Kendal, Pageruyung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Peningkatan tata kelola pemerintahan, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan	-		-	KECAMATAN PAGERUYUNG

											riset dan teknologi				
7	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	-	Kab. Kendal, Pageruyung, Semua Kel/Desa	-	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Peningkatan tata kelola pemerintahan, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan riset dan teknologi	-		-	KECAMATAN PAGERUYUNG
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah, pelayanan umum, kepegawaian serta keuangan Perangkat Daerah	100 persen	91.040.000			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Peningkatan tata kelola pemerintahan, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan riset dan teknologi	-	-	201.000.000

7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat											
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	5.000.000	Kab. Kendal, Pageruyung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Peningkatan tata kelola pemerintahan, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan riset dan teknologi	-		6.000.000	KECAMATAN PAGERUYUNG
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	46.800.000	Kab. Kendal, Pageruyung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Peningkatan tata kelola pemerintahan, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan riset dan teknologi	-		80.000.000	KECAMATAN PAGERUYUNG
7	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor											

						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	7.100.000	Kab. Kendal, Pageruyung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistik Peningkatan tata kelola pemerintahan, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan riset dan teknologi	-		40.000.000	KECAMATAN PAGERUYUNG
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	32.140.000	Kab. Kendal, Pageruyung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Kolaboratif serta Stabilitas Pembangunan Daerah Peningkatan tata kelola pemerintahan, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan riset dan teknologi	-		75.000.000	KECAMATAN PAGERUYUNG
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah, pelayanan umum, kepegawaian serta keuangan Perangkat Daerah	100 persen	33.645.350			-	Peningkatan tata kelola pemerintahan, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan	-	-	453.000.000	

											riset dan teknologi				
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan										
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	17 Unit	13.962.000	Kab. Kendal, Pageruyung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan tata kelola pemerintahan, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan riset dan teknologi	-		70.000.000	KECAMATAN PAGERUYUNG
7	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel										
					Jumlah Mebel yang Dipelihara	2 Unit	-	Kab. Kendal, Pageruyung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistik Peningkatan tata kelola pemerintahan, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan riset dan teknologi	-		3.000.000	KECAMATAN PAGERUYUNG
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya										

						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	38 Unit	9.000.000	Kab. Kendal, Pageruyung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Peningkatan tata kelola pemerintahan, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan riset dan teknologi	-		30.000.000	KECAMATAN PAGERUYUNG
7	01	01	2.09	0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya											
						Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	-	Kab. Kendal, Pageruyung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Peningkatan tata kelola pemerintahan, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan riset dan teknologi	-		-	KECAMATAN PAGERUYUNG
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya											

						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	10.683.350	Kab. Kendal, Pageruyung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistik Peningkatan tata kelola pemerintahan, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan riset dan teknologi	-		-	KECAMATAN PAGERUYUNG
7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya											
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	-	Kab. Kendal, Pageruyung, Semua Kel/Desa Kab. Kendal, Pageruyung, Pageruyung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Kolaboratif serta Stabilitas Pembangunan Daerah Peningkatan tata kelola pemerintahan, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan riset dan teknologi	-		350.000.000	KECAMATAN PAGERUYUNG
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang responsif, cepat, mudah, dan sesuai kebutuhan masyarakat	100 persen	-						-	35.000.000	

7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	persentase kegiatan prioritas daerah lintas sektor yang diimplementasikan di kecamatan	100 persen	-			Memperkuat penyelarasn kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Peningkatan tata kelola pemerintahan, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan riset dan teknologi	Perangkat Daerah dan Masyarakat	-	9.000.000	
7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait											
						Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12 Laporan	-	Kab. Kendal, Pageruyung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasn kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Peningkatan tata kelola pemerintahan, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan riset dan teknologi	Perangkat Daerah dan Masyarakat		-	KECAMATAN PAGERUYUNG
7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan											

						Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	14 Dokumen	-	Kab. Kendal, Pageruyung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Peningkatan tata kelola pemerintahan, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan riset dan teknologi	Perangkat Daerah dan Masyarakat	9.000.000	KECAMATAN PAGERUYUNG
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	persentase kegiatan prioritas daerah lintas sektor yang diimplementasikan di kecamatan	100 persen	-			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Peningkatan tata kelola pemerintahan, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan riset dan teknologi	Perangkat Daerah dan Masyarakat	-	
7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan										
						Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	-	Kab. Kendal, Pageruyung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Peningkatan tata kelola pemerintahan, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik serta	Perangkat Daerah dan Masyarakat	-	KECAMATAN PAGERUYUNG

												peningkatan riset dan teknologi				
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-	-			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Peningkatan tata kelola pemerintahan, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan riset dan teknologi	Perangkat Daerah dan Masyarakat	-	26.000.000	
7	01	02	2.04	0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha											
					Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	14 Dokumen	-	Kab. Kendal, Pageruyung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Peningkatan tata kelola pemerintahan, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan riset dan teknologi	Perangkat Daerah dan Masyarakat		10.000.000	KECAMATAN PAGERUYUNG	

7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan											
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	2 Laporan	-	Kab. Kendal, Pageruyung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan kemandirian desa dan pemerataan pembangunan desa	Perangkat Daerah dan Masyarakat		16.000.000	KECAMATAN PAGERUYUNG
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya kapasitas masyarakat desa dan kelurahan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan	33 persen	21.056.000						-	115.000.000	
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Presentasi aspirasi masyarakat dalam proses musrenbang	33 persen	21.056.000			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Peningkatan kemandirian desa dan pemerataan pembangunan desa	-	-	100.000.000	
7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa											

						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	14 Lembaga Kemasyarakatan	2.950.000	Kab. Kendal, Pageruyung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistik Peningkatan kemandirian desa dan pemerataan pembangunan desa	-		25.000.000	KECAMATAN PAGERUYUNG
7	01	03	2.01	0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan											
						Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	14 Dokumen	18.106.000	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kendal, Pageruyung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Kolaboratif serta Stabilitas Pembangunan Daerah Peningkatan kemandirian desa dan pemerataan pembangunan desa	-		70.000.000	KECAMATAN PAGERUYUNG
7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan											

						Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	14 Laporan	-	Kab. Kendal, Pageruyung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Peningkatan tata kelola pemerintahan, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan riset dan teknologi	-		5.000.000	KECAMATAN PAGERUYUNG
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	persentase kelembagaan kemasyarakatan yg dibina	12 laporan	-			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Peningkatan tata kelola pemerintahan, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan riset dan teknologi	Perangkat Daerah dan Masyarakat	-	15.000.000	
7	01	03	2.03	0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan											
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	14 Lembaga Kemasyarakatan	-	Kab. Kendal, Pageruyung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Peningkatan tata kelola pemerintahan, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik serta	Perangkat Daerah dan Masyarakat		5.000.000	KECAMATAN PAGERUYUNG

											peningkatan riset dan teknologi					
7	01	03	2.03	0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12 Laporan	-	Kab. Kendal, Pageruyung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistik Peningkatan tata kelola pemerintahan, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan riset dan teknologi	Perangkat Daerah dan Masyarakat		10.000.000	KECAMATAN PAGERUYUNG
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Terwujudnya sinergi antarperangkat daerah, aparat keamanan, dan masyarakat dalam menjaga ketentraman umum	14 laporan	41.050.000						-	140.400.000	
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-	9.250.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan kemandirian desa dan pemerataan pembangunan desa	Perangkat Daerah dan Masyarakat	-	45.000.000	

7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan											
						Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	9.250.000	Kab. Kendal, Pageruyung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan kemandirian desa dan pemerataan pembangunan desa	Perangkat Daerah dan Masyarakat		45.000.000	KECAMATAN PAGERUYUNG
7	01	04	2.02		Koordinasi dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Presentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditangani	14 laporan	31.800.000			-	Peningkatan kemandirian desa dan pemerataan pembangunan desa	-	-	95.400.000	
7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia											
						Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Laporan	31.800.000	Kab. Kendal, Pageruyung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kemandirian desa dan pemerataan pembangunan desa	-		95.400.000	KECAMATAN PAGERUYUNG
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya harmonisasi hubungan antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan pemangku kepentingan	42 orang	5.250.000						-	50.000.000	
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Presentase potensi kasus konflik sosial yang ditangani	42 orang	5.250.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan kemandirian desa dan pemerataan	Perangkat Daerah dan Masyarakat	-	50.000.000	

											pembangunan desa				
7	01	05	2.01	0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional										
					Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	50 Orang	5.250.000	Kab. Kendal, Pageruyung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter Peningkatan kemandirian desa dan pemerataan pembangunan desa	Perangkat Daerah dan Masyarakat		40.000.000	KECAMATAN PAGERUYUNG
7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan										
					Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	-	Kab. Kendal, Pageruyung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Peningkatan tata kelola pemerintahan, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan riset dan teknologi	Perangkat Daerah dan Masyarakat		10.000.000	KECAMATAN PAGERUYUNG
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	14 dokumen	7.100.000					-	78.241.428	

7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Presentase penyusunan APBDes tepat waktu/ persentase desa dengan tata kelola baik	14 dokumen	7.100.000			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan kemandirian desa dan pemerataan pembangunan desa	Perangkat Daerah dan Masyarakat	-	78.241.428	
7	01	06	2.01	0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa											
						Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	14 Dokumen	-	Kab. Kendal, Pageruyung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan kemandirian desa dan pemerataan pembangunan desa	Perangkat Daerah dan Masyarakat		18.241.428	KECAMATAN PAGERUYUNG
7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa											
						Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	14 Dokumen	-	Kab. Kendal, Pageruyung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan kemandirian desa dan pemerataan pembangunan desa	Perangkat Daerah dan Masyarakat		25.000.000	KECAMATAN PAGERUYUNG
7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa											
						Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	14 Dokumen	3.050.000	Kab. Kendal, Pageruyung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan kemandirian desa dan pemerataan pembangunan desa	Perangkat Daerah dan Masyarakat		30.000.000	KECAMATAN PAGERUYUNG
7	01	06	2.01	0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa											

						Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	14 Dokumen	-	Kab. Kendal, Pageruyung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Peningkatan tata kelola pemerintahan, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan riset dan teknologi	Perangkat Daerah dan Masyarakat	-	KECAMATAN PAGERUYUNG
7	01	06	2.01	0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa										
						Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	2 Dokumen	150.000	Kab. Kendal, Pageruyung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Peningkatan tata kelola pemerintahan, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan riset dan teknologi	Perangkat Daerah dan Masyarakat	-	KECAMATAN PAGERUYUNG
7	01	06	2.01	0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa										

						Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	14 Dokumen	150.000	Kab. Kendal, Pageruyung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistik Peningkatan tata kelola pemerintahan, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan riset dan teknologi	Perangkat Daerah dan Masyarakat	-	KECAMATAN PAGERUYUNG
7	01	06	2.01	0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa										
						Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	14 Dokumen	3.450.000	Kab. Kendal, Pageruyung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan kemandirian desa dan pemerataan pembangunan desa	Perangkat Daerah dan Masyarakat	5.000.000	KECAMATAN PAGERUYUNG
7	01	06	2.01	0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya										
						Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	14 Laporan	150.000	Kab. Kendal, Pageruyung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistik Peningkatan tata kelola pemerintahan, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan riset dan teknologi	Perangkat Daerah dan Masyarakat	-	KECAMATAN PAGERUYUNG
7	01	06	2.01	0018	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan										

						Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	14 Laporan	150.000	Kab. Kendal, Pageruyung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif Peningkatan tata kelola pemerintahan, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan riset dan teknologi	Perangkat Daerah dan Masyarakat	-	KECAMATAN PAGERUYUNG
J U M L A H								3.356.842.480						4.417.641.428	

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Kecamatan Pageruyung Kabupaten Kendal Tahun 2026 merupakan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2026. Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Pageruyung Kabupaten Kendal tahun 2026 ini telah diupayakan sebaik-baiknya, terukur dan akuntabel, disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja pada tahun-tahun sebelumnya, isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, serta memperhatikan aspirasi masyarakat.

Dalam pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Pageruyung Kabupaten Kendal akan mengacu pada aturan-aturan yang berlaku sehingga pencapaian terhadap sasaran yang diharapkan akan terpenuhi. Jika dalam proses selanjutnya ternyata kondisi keuangan daerah tidak dapat memenuhi pagu indikatif yang dialokasikan untuk Kecamatan Pageruyung Kabupaten Kendal dimana implikasinya Kecamatan Pageruyung Kabupaten Kendal akan mengurangi jumlah pagu kegiatan dan merasionalisasi kembali anggaran pada setiap kegiatan yang ada. Dalam mengeliminasi dan merasioanalisis RENJA yang ada, Kecamatan Pageruyung Kabupaten Kendal akan benar-benar menelaah dimana kegiatan-kegiatan yang dapat dieliminasi tersebut adalah kegiatan-kegiatan yang paling kecil peranannya dalam pencapaian target dan sasaran dalam RENSTRA.

Keberhasilan pelaksanaan Renja tergantung pada sikap mental, tekad, semangat, ketaatan dan disiplin para penyelenggara pemerintahan, serta peran aktif masyarakat. Dalam kaitan itu mohon aparat pemerintah khususnya Aparatur Kecamatan Pageruyung Kabupaten Kendal dan lembaga lainnya bersama masyarakat perlu bersungguh-sungguh dalam melaksanakan program-program pembangunan sebagaimana yang tertuang dalam Renja ini

Demikian Rencana Kerja Tahun 2026 Kecamatan Pageruyung Kabupaten Kendal disusun dengan harapan dapat menjadi acuan dalam Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Pageruyung Kabupaten Kendal tahun 2025 dan dapat menjadi

pertimbangan Tim Anggaran Pemerintah Daerah dalam mengalokasikan anggaran pada Kecamatan Pageruyung Kabupaten Kendal.

CAMAT PAGERUYUNG



AKHMAD SODIKIN, S.Sos
Pembina
NIP. 19730822 199803 1 003